

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI DI PULAU JAWA

Julia Nur Indah Sari, Ida Nuraini

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

* Corresponding author: Liyanurindah@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 12 March 2020

Revised 17 April 2020

Accepted 12 May 2020

Available online 21 May 2020

Keywords:

Poverty; unemployment; literacy; life expectancy.

JEL Classification
B22;E24;I15;I25;P36

Abstrak

Poverty is an issue that must be resolved by a country, especially developing countries. Poverty is also influenced by many factors such as income, health, education, unemployment and access to goods and services. The study research the effect of literacy rate, life expectancy, and an unemployment rate of poverty every province in Java Island in 2014-201. The research uses quantitative method. Data analysis using the panel data model by common effect, fixed effect and random effect. While for the best estimation model using chow test, Hausman test and LM test. The results of this study indicate that the best estimation model this study is a random effect model, which means literacy rate significantly negative effect on poverty, life expectancy significant positive effect on poverty, and unemployment rate significantly positive effect on poverty. Therefore, the government is expected to improve the quality of a strong planning strategy so that is can be achieved the purpose for the welfare of the poor, which is a form of success in developing a country.

PENDAHULUAN

Istilah kemiskinan bemula ketika seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, serta dianggap tingkat kemakmurannya masih dibawah standar hidup tertentu. Kurangnya kesejahteraan membuat angka orang miskin semakin bertambah, dengan dikaitkannya kepunyaannya atau hak untuk barang, pendapatan yang rendah dan konsumsi rumah tangga yang mulai berkurang membuat mereka masih terjebak dalam kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah hal yang tidak dapat dilakukan secara terpisah dari konteks pendidikan, kesehatan bahkan penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi warga setempat. Keterkaitan lainnya juga dialami oleh pengangguran, tenaga kerja, akses terhadap barang, lokasi, gender bahkan lokasi lingkungan yang ditempati (Jufriadi, 2016)

Bagi negara Indonesia, kemiskinan sebagai suatu masalah yang sudah melekat sejak dulu dibangsa ini, tanda-tanda tentang berakhirnya pun belum menunjukkan penyelesaian yang tepat dalam menanggulangi hal tersebut. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika, pada tahun 2018 antara lain populasi penduduk miskin dibawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen yang berkurang sebesar 633,2 ribu orang yang dibandingkan situasi tahun 2017 sebesar 26,58 juta atau setara dengan 10,12 persen. Tetapi, nilai tersebut masih cukup besar dibandingkan dengan negara-negara lain yang perekonomiannya lebih maju. Situasi masyarakat yang hidup dalam lingkaran kemiskinan pada umumnya tetap mengalami keterlambatan gizi, kesehatan yang buruk, buta huruf yang masih tinggi di pelosok daerah serta lingkungan yang buruk dan ketersediaan infrastruktur yang kurang untuk melayani publik (Arius, 2012).

Todaro dalam Edi Dores et al., 2012 mengungkapkan bahwa tujuan utama dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai pandangan ekonomi baru yang tidak hanya pertumbuhan PDRB saja yang menjadi tujuan semata, tetapi juga pengentasan kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan yang termasuk dalam upaya memajukan dan mengembangkan perekonomian. Sehingga masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera diatasi. Angka kemiskinan agregat secara makro juga sering dimaknai dengan pengukuran perkembangan dan pembangunan ekonomi suatu bangsa, untuk memperhitungkan suatu kemiskinan dapat menggunakan cara dengan pendekatan keahlian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat kemiskinan juga dianggap sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan harian seperti makanan atau non makanan, yang berimplementasi pada garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.

Problematika kemiskinan yang terjadi di Provinsi-provinsi di Pulau Jawa terutama tidak meratanya persentase penduduk miskin, oleh karena itu perlunya diketahui faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan jumlah penduduk miskin. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berperan dalam memunculkan kemiskinan adalah tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan pengangguran. Salah satu indikator pengukuran dari tingkat pendidikan adalah dengan Angka Melek Huruf (AMH), sedangkan untuk tingkat kesehatan yaitu dengan Angka Harapan Hidup (Nadia Islami, 2013).

Angka melek huruf juga dapat menjadi indikator untuk bahan pertimbangan pada perkembangan pendidikan penduduk. Jika angka melek huruf meningkat, maka semakin tinggi pula derajat sumber daya manusianya. Penduduk yang dapat membaca dan menulis diduga memiliki kapasitas dan keahlian karena dapat menyerap ilmu atau informasi baik lisan maupun tulisan. Pengentasan kemiskinan juga berpengaruh di segi kesehatan masyarakat yang baik dari tingkat kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara langsung atau tidak langsung. Menurunnya tingkat kesehatan pada anak akan berdampak pada kesediaan anak untuk belajar disekolah, absen sekolah atau tingkat bolos disekolah dan kurangnya kedisiplinan waktu saat menerima pembelajaran sehingga berpengaruh pada kemungkinan anak menamatkan sekolah tepat waktu dan mendapatkan pekerjaan yang efektif dibandingkan dengan anak yang sehat (Muhtarom, 2016).

Peneliti mengambil kasus kemiskinan di Pulau Jawa dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah memungkinkan tingkat kemiskinan akan terus meningkat serta masih adanya ketidakseimbangan antara pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kurang akibatnya angka kemiskinan juga terus menjadi permasalahan utama. Jumlah penduduk yang semakin bertambah juga menyebabkan permintaan tenaga kerja meningkat namun tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai oleh pemerintah atau swasta. Serta adanya ketimpangan antar wilayah yang tiap daerahnya mempunyai perbedaan program kebijakannya masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki tujuan apakah kemiskinan di Pulau Jawa dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dengan salah satu indikator yaitu angka melek huruf, tingkat kesehatan yaitu angka harapan hidup serta tingkat pengangguran yang menjadi persoalan utama tiap tahun.

Unggul Priyadi dan Jati Asmoro (2010) melakukan penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor penentu yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin regional di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita tidak berpengaruh pada kemiskinan, *Human Development Index* berpengaruh signifikan dengan korelasi negatif terhadap kemiskinan, sedangkan untuk angka harapan hidup berkorelasi positif signifikan terhadap kemiskinan. Dilihat dari persamaan peneliti dahulu dan sekarang variabel bebasnya yaitu angka harapan hidup sama-sama

berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi untuk variabel terikat peneliti terdahulu menggunakan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 1976-2009. Peneliti sekarang menggunakan persentase penduduk miskin tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2018. Perbedaan terletak di variabel bebas yang bertambah yaitu pendapatan perkapita, kesenjangan pendapatan, *human development index* serta angka harapan hidup dengan menggunakan data *time series*.

Wahyudi dan Rejekingsih (2015) mengenai analisis kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Persamaan dari penelitian sekarang adalah terletak pada variabel independen yaitu Tingkat pengangguran yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan serta menggunakan model data panel. Sedangkan perbedaannya terletak pada daerah penelitian di Jawa Tengah dan penelitian sekarang menggunakan wilayah pulau Jawa. Kemudian, peneliti terdahulu juga menambahkan variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah.

Wirawan dan Arka (2015) meneliti mengenai analisis pengaruh pendidikan, PDRB perkapita dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa variabel pendidikan dan PDRB perkapita secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Perbedaan dengan peneliti dahulu adalah variabel pendidikan menggunakan angka rata-rata lama sekolah sedangkan peneliti sekarang menggunakan angka melek huruf serta tidak ada variabel PDRB perkapita. Lokasi penelitian menggunakan Provinsi Bali tahun 2007-2013, sedangkan peneliti sekarang menggunakan provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2018.

Myanti Astrini dan Purbadharmaja (2013) meneliti tentang pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil penelitian menghasilkan bahwa laju pertumbuhan PDRB secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, angka melek huruf secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, sedangkan tingkat pengangguran terbuka secara parsial juga berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Bali. Secara bersama-sama PDRB, angka melek huruf dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Bali. Perbedaan terletak laju pertumbuhan PDRB yang berada di peneliti terdahulu sedangkan peneliti sekarang menggunakan angka harapan hidup di tiap Provinsi Pulau Jawa.

Aiyedogbon & Ohwofasa, (2012) menjalani penelitian mengenai *Poverty and Youth unemployment in Nigeria 1987-2011*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengangguran mempunyai korelasi positif signifikan terhadap kemiskinan, Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Nigeria. Sedangkan variabel pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Nigeria. Oleh karena itu upaya holistik harus dilakukan oleh pemerintah disemua tingkatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menanggulangi pengangguran. Perbedaan penelitian ini terletak pada penambahan variabel pertanian dan PDB sedangkan peneliti sebelumnya hanya menggunakan angka melek huruf dan angka harapan hidup. Serta lokasi dan jangka waktu penelitian sebelumnya menggunakan lokasi negara Nigeria pada tahun 1987 sampai 2012 dan peneliti sekarang lokasi penelitian provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 hingga 2018.

Menurut Kartasamita Ginandjar, 1996:234-235 dalam Nurwati, 2008, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Seseorang dikatakan miskin absolut ketika penghasilannya lebih rendah dari

garis kemiskinan absolut atau jumlahnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) berdasarkan kemiskinan absolut dapat mengacu pada pengukuran yang dilakukan dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan perkapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa (Sayogyo, 2000 dalam Nurwati, 2008). Sedangkan untuk kemiskinan relatif menggunakan ukuran pendapatan yaitu ketimpangan distribusi pendapatan (Nurwati, 2008).

Dalam teori Nurske, kemiskinan merupakan dampak dari keterbelakangan atau ketidaksempurnaan pasar dan berkurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas akibatnya pendapatan yang mereka terima juga menurun dan bisa berimplikasi pada tabungan serta minat seseorang untuk berinvestasi juga akan menurun. Gejala kemiskinan struktural dan kultural semacam ini menggambarkan bagaimana penduduk miskin tetap menjadi miskin karena keadaan awal miskin, dan demikian terus berlaku secara berkelanjutan (Nurske dalam Kuncoro M, 2014:107).

Sedangkan dalam teori martinussen tahun 1997, Kemiskinan ekonomi juga dapat berpengaruh pada kemiskinan secara politis. Seseorang yang mengalami kemiskinan ekonomi memiliki kesulitan hidup yang disebabkan beberapa kondisi seperti, buruknya derajat kesehatan, pendidikan yang rendah, produktivitas yang rendah disertai tingkat pendapatan yang rendah pula sehingga membuat daya beli masyarakat juga menurun. Kondisi tersebut diakibatkan oleh malnutrisi dan hidup dilingkungan dengan standar tempat tinggal serta sanitasi yang belum memadai.

Secara ekonomi lingkaran kemiskinan berputar dan menjerat orang-orang miskin sampai mereka harus terjebak dalam lingkaran kemiskinan politis. Seseorang yang terlanjur terjebak dalam kemiskinan politis, mereka tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai ketersediaan pilihan dalam hidup, tidak terorganisir, pasif secara politik, terjadi perbedaan sosial dan konflik kepentingan serta tidak memiliki akses didalam pengambilan kebijakan. Berdasarkan dari segi kesehatan, suatu masyarakat yang terlahir dari keluarga miskin mengalami kesulitan untuk hidup secara sehat dan layak. Hal inilah yang membuat munculnya beberapa pendapat bahwa seseorang yang terlahir dari keluarga miskin mengalami kesulitan untuk keluar dari kemiskinan dikarenakan sifat kemiskinan sudah menjerat orang tersebut. Sedangkan dilihat dari segi pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan orang tersebut mengalami kekurangan pengetahuan tentang masalah kesehatan (Martinussen dalam Tukiran et al., 2007:70-71).

Dalam penanggulangan kemiskinan, ditekankan dalam pendekatan paradigma demokrasi sosial yaitu perumusan strategi untuk menanggulangi kemiskinan adalah peran yang sangat penting untuk dijalankan oleh negara. Dalam pendekatan demokrasi sosial menanggulangi kemiskinan harus secara institusional atau melembaga seperti, program jaminan sosial atau memberi tunjangan pendapatan, atau dana pensiun yang akan bisa meningkatkan kebebasan dan kemandirian tiap individu karena penghasilan dasar yang sudah mereka terima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai pilihannya, jika penghasilan dasar tersebut ditiadakan maka menyebabkan ketergantungan (Syahyuti, 2006:95 dalam Sayifullah et al., 2016).

Kelemahan yang dimiliki oleh perumusan paradigma demokrasi sosial adalah adanya keterlibatan yang tinggi pada negara dalam pembentukan struktur dan lembaga yang berguna untuk penanggulangan kemiskinan. Padahal pencapaian tersebut berdasarkan ketergantungan pada kapabilitas kelompok miskin. Kemiskinan relatif yang digunakan dalam pendekatan ini juga sangat sulit untuk dibentuk demi memenuhi kebutuhan dasar oleh kelompok miskin. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan tidak hanya dilihat dari kebutuhan yang minim yang harus dicapai namun juga dapat dilihat dari rata-rata keahlian penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi dalam pendekatan ini juga dapat membuka aspek lain tentang

kemiskinan bahwa penyebabnya adalah struktur dan institusi yang telah menyebabkan tertutupnya akses bagi golongan tertentu dalam masyarakat. Sehingga akar permasalahan dari kemiskinan adalah bukan hanya terletak pada kemampuan seseorang untuk memperoleh penghasilan tetapi bagaimana bentuk lembaga dalam masyarakat dapat memberikan jaminan bagi semua kelompok agar tidak mengalami ketidakadilan atau ketimpangan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan.

Penduduk miskin disuatu negara yang berpendapatan rendah disebabkan oleh dua hal yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi serta lambannya perbaikan kualitas pendidikan (Samuelson dan Nordhaus, 1997 dalam Aningtyas et al., 2015). Karena itu, pemerintah melakukan upaya dengan cara memberantas penyakit, perbaikan gizi, pembaruan mutu pendidikan, menurunkan buta huruf, dan meningkatkan keterampilan masyarakatnya, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Jika upaya-upaya tersebut dilakukan secara optimal, maka masyarakat tersebut juga akan memanfaatkan modal lebih efektif, peningkatan untuk menyerap teknologi baru dan belajar dari kesalahan diri sendiri, dan jika upaya tersebut dapat didukung dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, maka akan dapat mengurangi kemiskinan (Aningtyas et al., 2015).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai pengaruh angka melek huruf, angka harapan hidup dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan tiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang saya lakukan menggunakan metode kuantitatif, yang disusun secara sistematis sesuai dengan bagian-bagian, realita atau kenyataan dan ada hubungan yang terdapat dalam obyek penelitian. Penelitian ini membahas tentang pengaruh angka melek huruf, angka harapan hidup dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2018. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistika saja. Data dari setiap variabel yang diambil adalah data angka melek huruf, angka harapan hidup, tingkat pengangguran terbuka. Berikutnya untuk variabel terikatnya yaitu angka kemiskinan menggunakan data persentase penduduk miskin tahun 2014-2018. Untuk wilayah yang diteliti terdiri dari enam provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Banten.

Penelitian ini menggunakan data panel yang berasal dari data sekunder tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ordinary least square* (OLS) yang bertujuan untuk menguji apakah hasil estimasi data sesuai dengan kebenarannya. Kemudian, untuk menguji data melalui data OLS maka akan melewati uji model data panel yaitu: *Common effect* (CE), *Fixed Effect* (FE), dan *Random Effect* (RE).

Kemudian, ketika dari ketiga model data panel diatas telah dilakukan, maka selanjutnya peneliti harus melakukan pemilihan model estimasi untuk menentukan model manakah yang paling terbaik untuk dijadikan asumsi penelitian sekarang, uji tersebut diantara lain adalah:

Uji Chow yang berguna untuk menentukan apakah *fixed effect model* atau *Common Effect Model* dalam estimasi data panel. Jika nilai probabilitas Chi-square lebih dari 0,05 maka model yang digunakan adalah *common effect*. Begitu juga, dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka model yang digunakan adalah *fixed effect*. Apabila *fixed effect* yang terpilih, maka perlu dilakukan uji lagi dengan uji Hausmann yang berguna untuk mengetahui apakah yang dipakai harus *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM).

Selanjutnya ada uji Lagrange Multiplier yang bertujuan apakah *Random effect* lebih baik dari *Common Effect* (OLS). Untuk hipotesisnya sebagai berikut: Apabila nilai Breuch-Pagan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan menggunakan *common effect model*, begitu juga sebaliknya jika nilai Breuch-Pagan $< 0,05$ maka H_1 diterima dan menggunakan

random effect model. Hipotesis ini dilakukan untuk membandingkan P-value Breuch-Pagan dengan alpha (α) 0,05. Selanjutnya, juga menggunakan pengujian hipotesis terdiri dari uji F statistik dan Uji T statistik serta koefisien determinasi (R^2)

Bentuk persamaan struktural yang memperlihatkan hubungan perilaku antar variabel ddigunakan dalam persamaan (1)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 AMHit + \beta_2 AHHit + \beta_3 Pengangguranit + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin) (%)
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen
- X1 = Angka Melek Huruf (%)
- X2 = Angka Harapan Hidup (%)
- X3 = Tingkat Pengangguran (%)
- e = Error
- i = Daerah
- t = Waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh angka melek huruf, angka harapan hidup dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan tiap provinsi di Pulau Jawa. Data tersebut bersumber dari BPS. Data ini terdiri dari enam provinsi di Pulau Jawa antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Penelitian ini menggunakan jangka waktu lima tahun mulai dari 2014 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang disajikan dengan analisis ekonometrika.

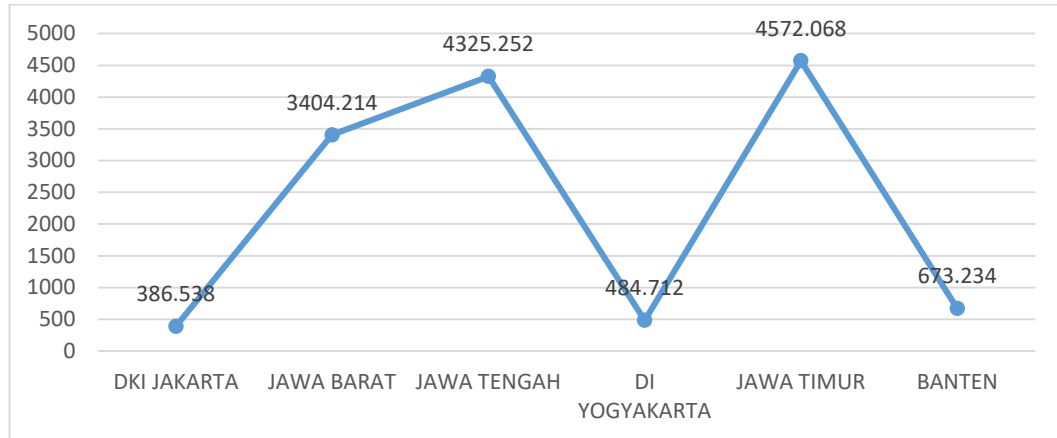
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan dasar, karena hal itu menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Kemiskinan juga berarti masalah kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan penghasilan, sehingga semua orang akan sepakat apabila kemiskinan ditanggulangi dengan strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakan akurat dan tepat sasaran. Kemiskinan dalam penelitian ini dapat diukur dengan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 hingga 2018.

Jika dilihat dari pengelompokkannya, penduduk miskin terbagi menjadi masyarakat pedesaan dan perkotaan, yang umumnya bekerja sebagai buruh tani, petani tambak, pedagang kecil atau kaki lima, asongan, pemulung, gelandangan bahkan pengemis jalanan. Gerombolan ini akan membuat problema baru yang akan terus berlanjut menjadi kemiskinan kultural dan struktural jika tidak ditanggulangi dengan serius. Secara universal, penduduk dalam cakupan miskin yakni golongan residual atau cakupan masyarakat yang belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan. Mereka juga kebanyakan tidak memiliki kualitas diri yang artinya pendidikan yang rendah, pelatihan kerja yang minim, pemanfaatan bantuan sosial kurang merata, hak atas lindungan hukum atau undang-undang yang kurang memihak mereka (Vera L.Y et al., 2018)

Tolak ukur tentang warga miskin yang bersedia dengan mengimplementasi kebijakan program pembangunan kecamatan menurut BKKBN, untuk menetapkan peraturan penduduk miskin yang paling tidak memenuhi sebagai berikut; hunian yang layak atas nama pribadi atau bukan miliki sendiri, akses sanitasi dan air bersih, upah atau dikonversi dengan pengeluaran, kepemilikan aset, aturan makan dengan lebih dari dua kali sehari dan kualitas gizi, dalam satu tahun dapat membeli satu set pakaian. Dari kriteria tersebut, bila 3 skor sudah diperoleh atau lebih maka anggota keluarga tersebut dapat dikategorikan miskin. Sehingga, kewajiban dan kestabilan dalam

kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi masalah kemiskinan dengan cara-cara yang adil tanpa masyarakat merasakan ada rasa tidak adil dalam memajukan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari pada hak-hak manusia, nondiskriminasi, serta memberikan perlindungan yang belum beruntung (Yulianto Kadji, 2004).

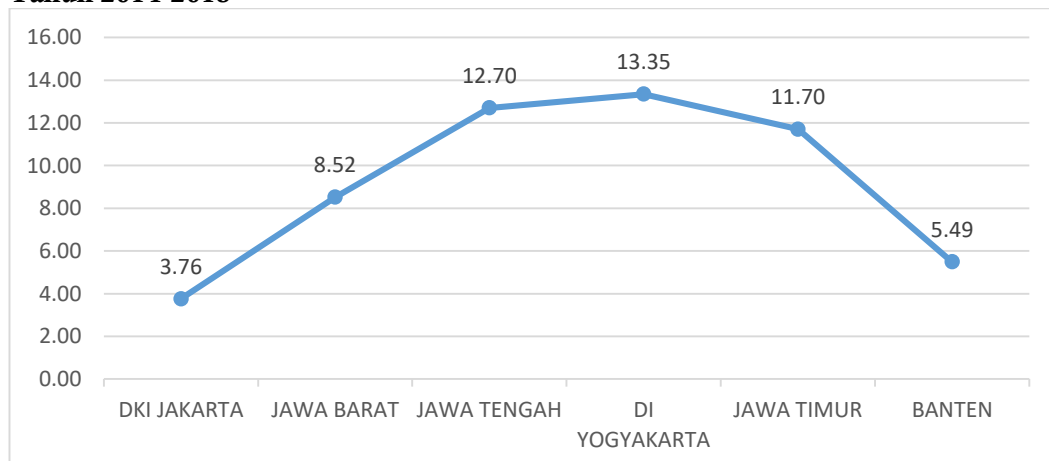
Gambar 1. Rata-rata Jumlah Penduduk Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Data diolah, 2020.

Berdasarkan dari gambar 1, menunjukkan bahwa kemiskinan tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 4572,068. Sedangkan trend terendah terletak DKI Jakarta sebesar 386,538. Hal itu disebabkan karena DKI Jakarta merupakan wilayah pusat perekonomian untuk sektor formal atau informal. Untuk jumlah penduduk miskin tertinggi yang dialami oleh Provinsi Jawa Timur banyak diakibatkan oleh pelayanan pendidikan yang masih belum berkompeten dan berkualitas, sistem pelayanan kesehatan yang masih susah dijangkau oleh penduduk desa atau jauh dari perkotaan, serta kesempatan kerja bagi yang baru merayakan kelulusan pendidikan dan tipe perusahaan yang membutuhkan orang-orang yang berkompeten dan mempunyai keahlian didalam bidang tersebut (Prastyo et al., 2011).

Gambar 2. Rata-Rata Persentase Penduduk Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Data diolah, 2020.

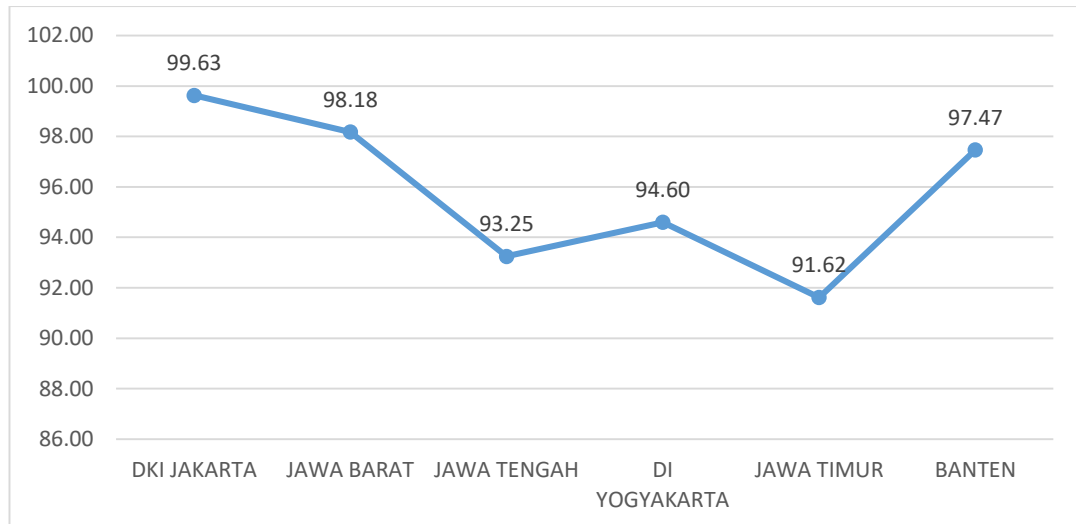
Berdasarkan gambar 2, rata-rata persentase penduduk miskin tertinggi dari tahun 2014-2018 terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 13,35 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah pada tahun 3,76 persen di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan cakupan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang

cukup luas dan ada kesetaraan dengan pertumbuhan penduduk dengan lapangan pekerjaan yang mulai berkembang. Faktor pendukung menurunnya kemiskinan yaitu inflasi yang sudah bisa dikendalikan dengan optimal, penyediaan lapangan pekerjaan sudah mulai ditingkatkan serta adanya penurunan angka pengangguran terbuka. Provinsi DKI Jakarta juga mencatat komoditas makanan masih berfungsi cukup signifikan terhadap garis kemiskinan dibandingkan dengan peranakan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan) (Prastyo et al., 2011).

Sedangkan di wilayah DI Yogyakarta penduduk miskin di wilayah ini memiliki karakter tersendiri yang kerap ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduknya. Setengah dari penduduknya juga memiliki pendapatan perkapita rendah, dan adanya keterbatasan lowongan pekerjaan yang bisa diakses masyarakat menjadi terbatas dan cenderung berganti ke sektor informal seperti PKL dan musiman. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti yang sekaligus memberikan bukti bahwa kemiskinan di bangsa ini, termasuk DIY dasarnya bersifat krisis multidimensi. Oleh sebab itu, pendapat dari segi keagregatan ekonomi dalam mendeskripsikan kemiskinan harus dilengkapi melalui indikator pengukuran yang bersifat nonekonomi. Disamping itu, pemerintah DIY juga perlu mengetahui penyebab utama kemiskinan masyarakat serta kemungkinan untuk menaikkan anggaran daerah pertahunnya (Niswati, 2014).

Kemudian, untuk tahun 2016 hingga 2018, angka kemiskinan cenderung terus menurun ini membuktikan bahwa kebijakan dan program pemerintah yang dijalankan maupun yang sedang berlangsung sudah mulai optimal, dan untuk peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan mulai ditingkatkan. Penanggulangan kemiskinan DIY dilakukan dengan kebijakan untuk meningkatkan anggaran daerah, pengembangan usaha-usaha mikro kecil untuk masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Adanya bantuan sosial yakni berupa beras miskin, bantuan langsung tunai sebagai ganti rugi atas naiknya harga bahan bakar minyak (Niswati, 2014).

Gambar 3. Rata-Rata Angka Melek Huruf Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2018



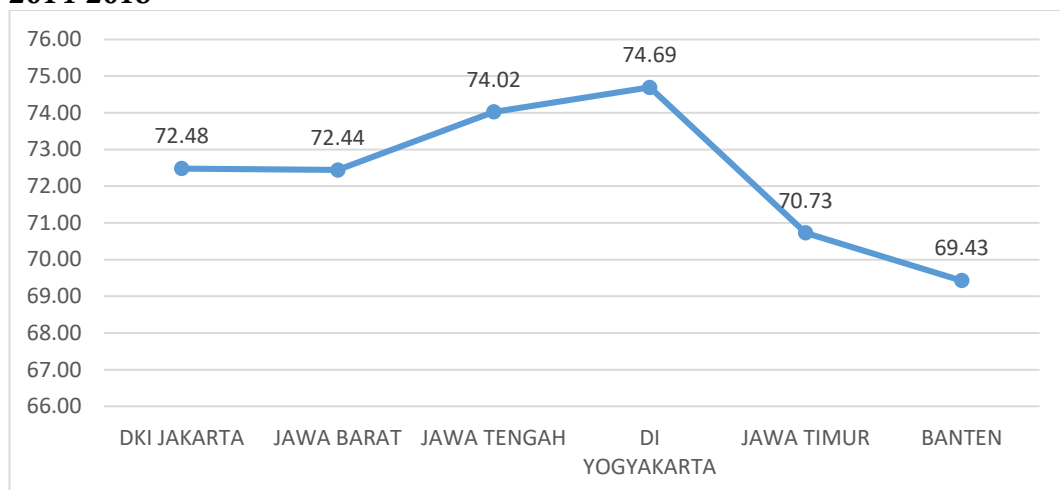
Sumber: BPS Data diolah, 2020.

Pada gambar 3, rata-rata angka melek huruf tertinggi terjadi di DKI Jakarta tahun 2014-2018 yang mencapai 99,63 persen sedangkan terendah terletak di Jawa Timur sebesar 91,62 persen. Hal ini disebabkan populasi penduduk yang bertambah tidak seimbang dengan berkembangnya tingkat pendidikan, sehingga infrastruktur untuk penduduk yang buta huruf tidak memiliki keterampilan dan keahlian. Untuk

dapat meningkatkan angka melek huruf atau kecakapan baca tulis masing-masing wilayah harus melakukan pendataan dan menggali permasalahan buta huruf serta membuat program atau kegiatan belajar bagi masyarakat dalam bentuk dua fase penanganan yaitu pertama penanganan buta huruf tingkat dasar atau buta huruf murni adalah penduduk yang belum mampu membaca, menulis, dan menghitung. Kedua, penanganan buta huruf untuk “mandiri” ditujukan kepada penduduk yang telah ditangani pada tahap pertama dan akan ditingkatkan lagi melalui kegiatan keterampilan (Fithri et al., 2017).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menguatkan kapasitas ekonomi dan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan program penanganan diatas terbukti bahwa pada beberapa wilayah di Pulau Jawa termasuk wilayah DKI Jakarta pada tahun 2018 memiliki angka melek huruf tertinggi sebesar 99,72 persen yang dapat dilihat persentase penduduk miskin yang menurun sehingga masyarakat sudah tercukupi untuk mendapatkan pendidikan formal dan banyak yang sudah memiliki kemampuan menulis dan membaca. Tetapi, secara keseluruhan angka melek huruf dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif saja. Hasil penelitian yang menggambarkan fenomena angka melek huruf terhadap penurunan kemiskinan dan sebaliknya menegaskan bahwa program pemerintah untuk memberantas buta huruf murni maupun mandiri dipengaruhi oleh *social welfare* (Tisniwati, 2012).

Gambar 4. Rata-Rata Angka Harapan Hidup Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2018



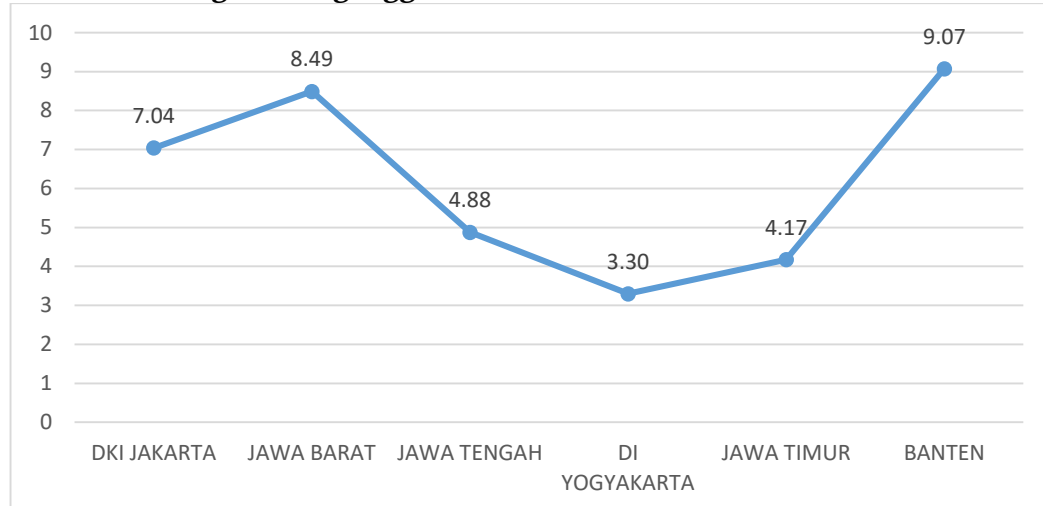
Sumber: BPS Data diolah, 2020.

Berdasarkan gambar 4. Rata-rata angka harapan hidup tertinggi terjadi pada tahun 2014 hingga 2018 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 74,69 persen, semakin tinggi angka harapan hidup penduduk menandakan bahwa adanya perbaikan kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, tetapi jika dilihat dari persentase kemiskinan apabila angka harapan hidup semakin tinggi maka peluang untuk jumlah penduduk miskin akan semakin meningkat. Sedangkan angka harapan hidup terendah terjadi pada tahun 2014-2018 di Provinsi Banten mencapai sebesar 69,43 persen. Secara keseluruhan tren angka harapan hidup mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Dalam negara-negara yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dan rata-rata hidup lebih lama maka secara ekonomi mereka mempunyai peluang untuk memperoleh penghasilan lebih tinggi.

Menurut Lincoln, 1999 dalam Wahyudi & Rejekingsih, 2015 bahwa campur tangan pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesehatan dengan menggunakan alat kebijakan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Memperbaiki masalah penduduk miskin akan meningkatkan golongan miskin, memiliki kesehatan dan daya kerja lebih baik, serta mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output kerja.

Mengkaji hasil penelitian dari indikator kesehatan, ada pengaruh positif signifikan yang mengindikasikan bahwa angka harapan hidup di Provinsi DIY menandakan harapan hidup yang tinggi belum tentu masyarakat sejahtera. Walaupun sebagian besar provinsi di Pulau Jawa memiliki nilai diatas rata-rata. Provinsi DI Yogyakarta dengan angka harapan hidup tertinggi dan Provinsi Banten yang terendah, dimana juga ada korelasi kedua wilayah tersebut dengan kantong kemiskinan tertinggi.

Gambar 5. Tingkat Pengangguran Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Data diolah, 2020.

Dilihat dari gambar 5. Terjadi pengangguran menurun pada tahun 2014 di DI Yogyakarta sebesar 3,33 persen sedangkan tingkat pengangguran tertinggi tahun 2015 sebesar 9,55 persen di Banten. Dari tahun ke tahun tingkat pengangguran di wilayah Pulau Jawa mengalami fluktuatif. Pengangguran yang rendah mungkin dapat mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin turun tetapi apabila diimbangi dengan faktor penentu seperti pelayanan kesehatan, pendidikan serta kesempatan kerja yang mencukupi dan tidak menyebabkan ketimpangan antar daerah. Sedangkan apabila tingkat pengangguran meningkat dapat terjadi kemiskinan yang meningkat juga. Pengangguran juga dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara, jika rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas artinya konsumsi saat ini berpengaruh pada pendapatan saat ini, maka akan berpengaruh langsung dari sisi penghasilan atau sisi konsumsi rumah tangga (Ningrum, 2017).

Jika rumah tangga tidak memiliki batasan likuiditas atau konsumsi saat ini tidak terlalu berpengaruh pada pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan kemiskinan semakin meningkat dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh pada jangka pendek (Retnowati et al., 2015). Selain itu, efek buruk yang ditimbulkan ialah berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan peluang masyarakat terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila suatu negara sangat buruk, maka kekacauan politik sosial selalu berlaku dan bisa menimbulkan efek buruk bagi masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Tenaga kerja DIY telah didominasi oleh lulusan SMA dan diikuti oleh sarjana, dimana tidak ada keseimbangan antara lulusan SMA dengan kualifikasi yang diinginkan oleh dunia kerja. Dari segi umur, penganggur didominasi kelompok umur 15-34 tahun. Selanjutnya, tahun 2016 mengalami penurunan, diindikasikan bahwa sempat adanya perbaikan kualitas angka kesempatan kerja, tetapi tahun 2017 sampai 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 3,02 persen dan 3,35 persen. Jumlah pengangguran meningkat seiring melambatnya laju pertumbuhan ekonomi baik secara

lokal atau nasional. Apalagi lulusan SMA atau perguruan tinggi semakin melonjak tinggi.

Hasil Analisis

Hasil pengujian mengungkapkan bahwa untuk menentukan metode terbaik yang digunakan dalam mengestimasi model data panel dilakukan dengan uji pemilihan metode estimasi terbaik. Pengujian tersebut antara lain uji CE, FE dan RE.

Tabel 1. Hasil Uji Model CE

Variabel	Common Effect		
	Koefisien	T-Statistik	Probabilitas
Konstanta	48,44402	3,879427	0,0006
AMH	-0,013546	-9,686900	0,0000
AHH	0,012045	6,782045	0,0000
Pengangguran	0,581682	2,717300	0,0116
R-Square		0,908833	
F-Statistik		86,39710	
Prob-Statistik		0,000000	

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 2. Hasil Uji Model FE

Variabel	Fixed Effect		
	Koefisien	T-Statistik	Probabilitas
Konstanta	229,7010	3,380676	0,0028
AMH	-0,010855	-2,054816	0,0525
AHH	-0,016364	-1,496960	0,1493
Pengangguran	0,312095	1,149824	0,2631
R-Square		0,981237	
F-Statistik		137,2801	
Prob-Statistik		0,000000	

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 3. Hasil Uji Model RE

Variabel	Random Effect		
	Koefisien	T-Statistik	Probabilitas
Konstanta	85,63409	2,620883	0,0145
AMH	-0,014533	-6,676645	0,0000
AHH	0,008236	2,097982	0,0458
Pengangguran	0,549594	2,447427	0,0215
R-Square		0,606367	

(dilanjutkan pada hal 12)

(Lanjutan Hal 11)

Variabel	Random Effect		
	Koefisien	T-Statistik	Probabilitas
Konstanta	85,63409	2,620883	0,0145
AMH	-0,014533	-6,676645	0,0000
AHH	0,008236	2,097982	0,0458
Pengangguran	0,549594	2,447427	0,0215
R-Square	0,606367		
F-Statistik	13,35044		
Prob-Statistik	0,000018		

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji model data panel diatas maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengestimasiian uji data panel dengan melakukan uji apakah yang paling terbaik diantara CE, FE dan RE. Estimasi pemilihan terbaik ini melalui tiga uji yaitu Uji Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier apabila diperlukan. Pertama, Uji Chow, dalam uji chow model yang terpilih adalah *fixed effect*, karena hasil uji chow menolak H0 dan diperoleh nilai probabilitas 0,0000. Dalam uji hausman model yang terpilih adalah *random effect*, dan hasil uji hausman menolak H1 dan diperoleh nilai probabilitas 0,0865. Dua uji diatas menghasilkan model data yang berbeda, maka dari itu dibutuhkan satu uji lagi yaitu uji LM, uji ini yang terpilih ialah *random effect*, karena hasil uji LM menerima H0 dan diperoleh nilai probabilitas 0,0000. Sehingga model terbaik yang terpilih adalah *random effect*, karena dari hasil uji chow dan uji hausman menunjukkan hasil yang berbeda. Sehingga didapatkan hasil rumus regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = 85,63409 - 0,014533 AMHit + 0,008236AHHit + 0,549594Pengangguranit + e$$

Kemudian, penelitian ini juga harus dilakukan dengan pengujian hipotesis. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas (angka melek huruf, angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran). Apabila nilai t-statistik < tingkat signifikan 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Variabel *Yit* yaitu variabel dependen yang nilainya akan diprediksi oleh variabelen independen dengan menggunakan angka melek huruf, angka harapan hidup dan tingkat pengangguran. Kemudian, β_0 sebesar 85, 63409, maka nilai konstanta dari persentase penduduk miskin, jika variabel AMH, AHH dan pengangguran terbuka mempunyai nilai sama dengan nol, akhirnya angka kemiskinan akan sebesar 85,63409.

Untuk variabel angka melek huruf terhadap kemiskinan mendapatkan hasil terdapat koefisien sebesar -0,014533 dengan nilai t-statistik sebesar -6,676645 dan probabilitas sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Jika angka melek huruf mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka perubahan pada tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar -0,014533. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin rendah angka melek huruf dalam suatu daerah maka akan berdampak pula pada tingkat kemiskinannya. Hal ini dikarenakan angka melek huruf atau kecakapan baca tulis merupakan salah satu faktor pendorong bagi masyarakat agar memiliki kemampuan atau keahlian untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pada akhirnya, pekerjaan yang baik tersebut

akan meningkatkan pendapatan yang diterima dan menghasilkan tingkat produktifitas yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan konsumsi masyarakat dan tidak tergolong miskin (Islami, 2013).

Selanjutnya, untuk variabel angka harapan hidup terhadap kemiskinan memiliki koefisien sebesar 0,008236 dengan nilai t-statistik sebesar 2,097982 dan probabilitas sebesar 0,0458. Karena nilai probabilitas dibawah 0,05 maka dapat dikatakan bahwa nilai angka harapan hidup berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Jika angka harapan hidup mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka perubahan tingkat kemiskinan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,008236. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi angka harapan hidup, maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Peningkatan angka harapan hidup bisa berarti baik dan buruk. Sisi baiknya angka ini menunjukkan perbaikan kesehatan masyarakat, namun dapat berarti buruk sebab meningkatkan jumlah masyarakat yang rentan terhadap berbagai penyakit, dari sinilah angka kemiskinan akan semakin meningkat dikarenakan mereka terbebani dengan harus membiayai penyakit yang menimpa mereka. Sehingga, akan menjadi beban apabila masyarakat mempunyai masalah penurunan tingkat kesehatan yang akan mengakibatkan peningkatan biaya pelayanan kesehatan, penurunan pendapatan, tidak adanya dukungan sosial dan ketidakramahan lingkungan (Islami, 2013).

Sedangkan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan mempunyai koefisien sebesar 0,549594 dengan nilai t-statistik sebesar 2,447427 dan probabilitas sebesar 0,0215. Karena nilai probabilitas dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai angka harapan hidup berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Jika tingkat pengangguran naik sebesar 1 persen maka perubahan tingkat kemiskinan juga akan naik sebesar 0,549594. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila pengangguran dalam suatu wilayah meningkat maka akan mempunyai pengaruh pada kemiskinan yang akan semakin tinggi. Pengangguran secara otomatis akan mengurangi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat yang dapat memiliki efek buruk yaitu mengurangi pendapatan dan tingkat konsumsi yang akan mengurangi kemakmuran yang ingin dicapai seseorang. Semakin turunnya angka pengangguran juga mengakibatkan masyarakat akan semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan (Misdawita et al., 2013)

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh F-statistik sebesar 13,35044 dan probabilitas f sebesar 0,000018. Dalam taraf signifikansi 0,05 maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji ini kemudian dilanjutkan dengan koefisien determinasi (R^2) diperoleh angka sebesar 0,606367. Hal ini bahwa kontribusi seluruh variabel terikat sebesar 60,64%. Sedangkan sisanya 39,36% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data menggunakan metode data panel dengan data sekunder. Berdasarkan hasil dari angka melek huruf maka dapat dilihat variabel tersebut memiliki hasil negatif dan signifikan sehingga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat kondisi masyarakat, dimana jika tingkat kecakapan baca tulis masyarakat baik, yang berarti dapat memberikan dampak baik bagi angka kemiskinan yang nantinya akan berkurang.

Peningkatan angka harapan hidup bisa berarti baik dan buruk. Sisi baiknya angka ini menunjukkan perbaikan kesehatan masyarakat, namun dapat berarti buruk sebab meningkatkan jumlah masyarakat yang rentan terhadap berbagai penyakit, dari sinilah angka kemiskinan akan semakin meningkat dikarenakan mereka terbebani dengan harus membiayai penyakit yang menimpa mereka.

Dalam suatu keadaan dimana jika tingkat kemiskinan suatu daerah yang tinggi salah satu faktornya dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang meningkat. Keadaan ini didukung oleh hasil olah data yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran bertanda positif yang artinya tingkat pengangguran tersebut akan dapat menimbulkan korelasi dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Aiyedogbon, J. O., & Ohwofasa, B. O. 2012. Poverty and youth Unemployment in Nigeria , 1987-2011. *International Journal of Business and Social Science*. October. **3(20)**. 269–279.
- Aningtyas, W. M., Suswandi, P. E., Yuliati, L. 2015. Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Jember*.
- Arius, J. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. **1**. 140–164.
- Edi Dores, Yenni Del Rosa, J. 2012. Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat.
- Fithri, N., & Kaluge, D. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, **15(2)**. 129.
- Jufriadi,. 2016. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sampang, Madura. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. **13(2)**. 252.
- Misdawita, & Sari, A. A. P. S. 2013. Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.
- Muhtarom, A. 2016. Pengaruh Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2015. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, **1(03)**. 154–165.
- Myanti Astrini, N. M., & Purbadharmaja, I. B. P. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E - urnal EP Unud*. **(2)**. 384–392.
- Nadia Islami, A. A. 2013. Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*. **53(9)**.1689–1699.
- Ningrum, S. S. 2017. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.**15(2)**.184.
- Niswati, K. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah istimewa yogyakarta tahun 2003-2011. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. **9(2)**. 82–89.
- Nurwati, N. 2008. Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*.**10(1)**. 1–11.
- Prastyo, A. A., Kadji, Y., Barat, S., Dores, E., Rosa, Y. Del, Anggit, P. Y., Nazir. 2011. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. **25(1)**. 89–100.

- Retnowati, D. 2015. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Widjayakusuma Purwokerto*. 608–618.
- Sayifullah, Gandasari Ratu T. 2016. Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi banten. **6(2)**. 236–255.
- Tisniwati, B. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. **10(1)**. 33.
- Vera Liling Yusica, Nazaruddin Malik, Z. A. 2018. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. **(2)**. 230–240.
- Wahyudi, D., & Rejekingsih, T. W. 2015. Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah. **(2)**. 1–15.
- Wirawan, I. M. T., & Arka, S. 2015. Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. **4(5)**. 546–560.
- Yulianto Kadji. (2004). Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya. *Jurnal UNG*.

Texbook:

- Mudrajat Kuncoro, 1997. *Ekonomi Pembangunan Teori dan Masalah Kebijakan*. UPP AMPYKPN.
- Tukiran, Pande M. Kutanegara, Agus Joko Piloyo, 2007. *Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan*. Pusat Studi dan Kebijakan UGM.